



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGOENG RAHARDJO**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **20324**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 8.890.000.000

1. Tanah Seluas 214 m2 di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. Tanah Seluas 800 m2 di SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/325 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/325 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 54 m2/100 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 63 m2/180 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 54 m2/150 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
8. Tanah Seluas 78 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
9. Tanah Seluas 78 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
10. Tanah Seluas 78 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
11. Tanah Seluas 1038 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 118.000.000

1. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
2. MOTOR, VESPA SPRINT IGET 50 ABS Tahun 2018, HASIL



SENDIRI Rp. 30.000.000

3. MOTOR, YAMAHA B6H A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
28.000.0004. MOBIL, HONDA ODYSSEY MINIBUS Tahun 2002, HASIL SENDIRI
Rp. 40.000.000**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 23.517.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 78.945.129**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 9.110.462.129**III. HUTANG** Rp. 456.674.889**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 8.653.787.240

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.